

## ***Public Support for Local Parties in the 2024 Elections in Banda Aceh (A Case Study of the Aceh Party)***

### **Dukungan Masyarakat terhadap Partai Lokal pada Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Partai Aceh)**

**Nofriadi, Saora Simanjourang\*, Muhammad Ilham Maulana, M. Hasanul Ichsan, Zacky Al-Kausar, Rio Rivaldi, Nazwa Nafisa Medina, Haikal Wangsa**

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia  
(Email: saorasimanjourang@gmail.com)

Received: 13 May 2024; Revised: 15 May 2026; Accepted: 15 May 2026

#### **Abstract**

*Support for a political party is inconsistent, as it can change at any time. In this study, we sought to identify the causes of the decline in public support for the Aceh Party in the city of Banda Aceh; we aimed to uncover the reasons behind this decline and provide recommendations for the Aceh Party and other parties facing similar challenges. This study employed a qualitative method. The findings indicate that the Aceh Party experienced a decline in votes in Banda Aceh because the city is not part of the conflict-affected region; the party's management remains disorganized; there are few traditional voters in Banda Aceh; local parties with strong ideologies are prevalent; the community faces severe economic hardship; public support has increased on a province-wide scale; and the Aceh Party lacks significant bargaining power in Banda Aceh. The recommendations we can offer are as follows: 1. Improve communication and direct community engagement through inclusive campaigns and concrete programs that have a direct impact. 2. Improve party governance, including transparency in fund management and the candidate selection process, to increase public trust.*

#### **Keywords:**

*Aceh parties; local parties; public support.*

#### **Abstrak**

Support Dukungan terhadap partai adalah sesuatu yang tidak konsisten, dalam artian dapat berubah kapan saja. Dalam penelitian ini kami mencari tahu penyebab menurunnya dukungan masyarakat terhadap Partai Aceh di kota Banda Aceh dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan alasannya dan memberikan rekomendasi terhadap partai aceh atau partai lain yang mengalami hal yang serupa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuannya adalah Partai Aceh mengalami penurunan suara dalam konteks Banda Aceh karena Banda Aceh tidak termasuk wilayah basis konflik, manajemen partai yang masih berantakan, tidak banyak pemilih tradisional di Banda Aceh, partai lokal dengan ideologi yang kuat, kondisi masyarakat yang melarat dalam bidang ekonomi, Dukungan masyarakat dalam skala Aceh meningkat, Partai Aceh tidak memiliki nilai tawar yang tinggi di kota Banda Aceh. Saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan langsung masyarakat dengan melalui kampanye yang inklusif dan program - program nyata yang berdampak langsung. 2. Memperbaiki tata kelola partai, termasuk transparansi dalam pengelolaan dana dan proses pemilihan calon, untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

### **Kata Kunci:**

partai lokal; partai aceh; dukungan masyarakat

### **Pendahuluan**

Indonesia termasuk negara yang menganut sistem demokrasi dalam menentukan pejabat dalam pemerintahannya, partai politik sudah menjadi syarat utama yang tidak dapat dirubah sebagai penyalur aspirasi masyarakatnya. Partai politik memiliki peran yang signifikan dalam mengantarkan kelompok tertentu kedalam kekuasaan. (Liata, 2020, hal. 80) Dalam perspektif Sigmud Neuman (1963) partai politik merupakan suatu organisasi yang memiliki kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik yang didalamnya terdapat usaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan menarik dukungan masyarakat atas dasar persaingan dengan golongan lain yang mempunyai pandangan atau tujuan yang berbeda. (Shandy, 2023)

Berdasarkan dari perspektif di atas partai politik di bentuk atas dasar kesepakatan bersama antara sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk mencapai target tertentu untuk mendapatkan kekuasaan yang nantinya dapat memberikan mereka wewenang untuk menjadi pemerintah sebagai wakil masyarakat.

Masyarakat merupakan penentu utama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan penyusunan kebijakan merupakan wujud partisipasi dalam politik. Partisipasi masyarakat dalam politik dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam politik semakin berkualitas pula demokrasi nya, namun jika partisipasi politik rendah dapat menunjukkan apatisme dan wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah yang terdahulu atau yang sedang berjalan.

Masyarakat dan partai politik memiliki hubungan saling membutuhkan antara satu sama lain, masyarakat membutuhkan partai politik sebagai perwakilan yang akan menyampaikan dan melaksanakan aspirasinya, sedangkan partai politik membutuhkan dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, kepercayaan dalam menjalani pemerintahan nantinya. Dalam pelaksanaan demokrasi di indonesia dilakukan pemilihan umum untuk memilihnya calon presiden maupun calon eksekutif dan legislatif, pemilihan umum ini biasanya diikuti oleh partai politik yang mengajukan masing-masing calonnya, partai politik disini dibagi menjadi dua partai nasional dan lokal.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan roda pemerintahannya, aceh mendapatkan otonomi khusus yang salah satu poin didalamnya aceh dapat mendirikan partai politik yang disebut dengan partai lokal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, partai lokal merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berdomisili di Aceh dengan cara sukarela demi memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat dan bangsa.

Adanya partai lokal tidak luput dari perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Aceh. Perjanjian damai ini dikenal dengan kesepakatan Helsinki. Kesepakatan damai ini ditandatangani oleh pemerintah indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Arjanto, 2023).

Partai lokal menjadi wadah perjuangan baru antara GAM dan pemerintah pusat. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif, hasil Survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) pada 28 Juli – 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas

masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal (Usman, 2021). Partai politik lokal Aceh lahir sebagai hasil dari kompromi politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan mencapai perdamaian di provinsi tersebut. Dalam rangka mencapai solusi perdamaian, GAM setuju untuk meninggalkan taktik kekerasan dalam perjuangan mereka dan mengakui otoritas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi partai lokal memberikan variasi dalam pilihan politik, meningkatkan kompetisi, dan memberikan suara baru dalam representasi politik di Aceh. (Usman, 2021)

Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang bermain di atas panggung demokrasi Indonesia di tingkat provinsi sejak tahun 2007 sampai 2019 dan akan mengikuti pesta demokrasi pada 2024 mendatang, partai ini pertama kali mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2009 dan keluar sebagai partai yang meraih suara tertinggi dengan menguasai 33 kursi provinsi dari 69 kursi di DPRA, namun pada pemilu 2014 partai yang mayoritas elit kombatan hanya mampu menduduki 29 kursi dari 81 kursi, pada pemilu legislatif Indonesia tahun 2019, suara yang diperoleh semakin merosot dibuktikan dengan kehilangan 11 kursi di DPRA dari 81, jadi hanya 18 kursi saja pada 2019.

### **Kajian Pustaka**

Menurut Robert ( dalam Hanafi, 2018) pengertian partai politik sebagai sebuah entitas yang berusaha untuk mencapai kontrol atas kekuasaan pemerintahan dengan cara mengikuti proses pemilihan umum, mencalonkan kandidat, dan bertarung untuk memenangkan jabatan politik. Partai politik juga dijelaskan sebagai kelompok mandiri dari masyarakat yang memiliki target tertentu dalam meraih kekuasaan, yang kemudian dapat diwujudkan dengan menguasai jabatan sipil dan struktur pemerintahan.

Menurut Benny Enrick dan Budi Handoyono partai politik lokal adalah sebuah organisasi politik yang terbentuk atas inisiatif sekelompok warga negara Indonesia yang tinggal di Aceh, dengan kesepakatan sukarela dan didasarkan pada persamaan kehendak serta cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan partai politik lokal ini adalah untuk mengikuti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dengan harapan dapat mewakili dan mengadvokasi kepentingan masyarakat serta memperjuangkan aspirasi mereka.

Menurut Lukmantoro, secara teoritis, politik identitas adalah upaya politis untuk memperjuangkan kepentingan anggota-anggota suatu kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, seperti ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Konsep politik identitas ini adalah alternatif dari politik perbedaan. Politik Identitas melibatkan tindakan politis yang bertujuan mengarahkan aspirasi anggota kelompok untuk memengaruhi kebijakan, menguasai distribusi nilai-nilai yang dianggap penting, bahkan menuntut hak penentuan nasib sendiri berdasarkan identitas primordial. Dalam konteks etnis, politik identitas tercermin dalam berbagai bentuk, mulai dari penyusunan regulasi lokal yang memasukkan nilai-nilai kultural, pemisahan wilayah administratif, aspirasi akan otonomi khusus, hingga munculnya gerakan separatisme. (Nasrudin, 2018)

### **Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, Saryono berpendapat metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan sifat atau karakteristik dari dampak sosial yang tidak dapat diukur dan jelaskan melalui pendekatan kuantitatif. (Saryono, 2010)

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas atau aspek penting suatu fenomena atau layanan, seperti makna di balik peristiwa tersebut yang dapat memberikan wawasan penting bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif juga dapat dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap teori praktis, kebijakan, masalah sosial, dan tindakan. Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggabungkan pemahaman alamiah fenomena dengan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan atau data primer yaitu wawancara yang memungkinkan peneliti untuk mengetahui dan memahami pendapat dari informan berdasarkan pengalamannya secara langsung. Peneliti memilih wawancara dikarenakan dapat membuka interaksi secara langsung antara peneliti dan informan sehingga lebih memungkinkan untuk mendapatkan data dari perspektif informan tersebut. Dalam memilih informan peneliti menggunakan pendekatan purposive sampling yang dimanan dalam pendekatan ini, pemilihan informan dilakukan berdasarkan dari keahlian dan pengalaman mereka yang relevan dan spesifik dengan permasalahan atau fenomena yang akan diteliti (Patton. 2002).

## **Pembahasan**

Perjanjian Helsinki tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membuka pintu bagi keberadaan partai politik lokal di Aceh. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia, memberikan warga Aceh akses lebih besar untuk menyampaikan kepentingan mereka melalui partai politik lokal. Namun, walaupun ada dukungan hukum dan potensi awal yang kuat, ada juga tantangan yang dihadapi oleh partai politik lokal di Aceh (Januar, 2019).

Kemungkinan penurunan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat jika partai politik lokal tidak dapat memenuhi ekspektasi mereka dan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan pendidikan politik, kurangnya penciptaan iklim yang kondusif, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. keberadaan partai politik lokal di Aceh bisa terancam jika tidak ada perubahan atau peningkatan dalam hal-hal tersebut. Jadi, sementara ada potensi yang besar, tantangan nyata juga perlu diatasi agar partai politik lokal dapat tetap relevan dan berkelanjutan di Aceh. Partai politik lokal di Aceh timbul setelah penandatanganan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kehadiran partai politik lokal ini dipandang sebagai langkah untuk memulihkan hak politik mantan anggota GAM.

Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan GAM juga menyediakan landasan bagi pembentukan partai politik lokal di Aceh. Saat ini, partai politik lokal di Aceh diizinkan untuk bersama-sama dengan partai politik nasional. Ini merupakan kebijakan yang berbeda dengan masa lalu di mana partai politik lokal cenderung ditekan oleh penguasa.

Menurut Pamungkas, partai politik lokal di Indonesia telah ada sejak Pemilu pertama tahun 1955, meskipun kemudian cenderung tenggelam karena kebijakan yang tidak mendukung. Abdul Mukthie Fadjar juga menjelaskan bahwa secara umum, partai politik lokal adalah partai yang mengandalkan dukungan dari wilayah atau daerah tertentu. Dengan demikian, partai politik lokal dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat dengan jaringan terbatas di suatu daerah atau wilayah, yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara secara sah.

Berdasarkan hasil wawancara kami bersama juru bicara partai Aceh yaitu bapak Nurzahri, beliau mengatakan bahwa partai aceh merupakan satu-satunya partai lokal yang memiliki ideologi yang sangat kuat, partai aceh ini juga merupakan partai yang dianggap sebagai partai yang menjembatani perjanjian perdamaian aceh dengan pemerintah pusat, namun dalam hal ini beliau mengatakan terjadi kesalahan yang sampai ini menjadi penyesalan dari pihak partai aceh, yaitu mereka tidak menjadikan MOU sebagai momen bersejarah yang tidak dilembagakan.

Namun jika berbicara mengenai realita saat ini, Nurzahri sebagai pihak dari Partai Aceh menduga bahwa menurunnya dukungan masyarakat kepada partai aceh disebabkan karena kondisi masyarakat aceh sendiri yang saat ini masih terpuruk dalam hal ekonomi sebagai dampak dari fenomena covid 19, dikarenakan kondisi ini juga mempengaruhi money politik yang terjadi khususnya pada pemilu 2024 kemarin, bahkan beliau mengatakan bahwa pemilu tahun ini merupakan pemilu yang paling buruk dikarenakan money politik yang semakin gencar dan terang-terangan.

Selain faktor money politik beliau juga berpendapat bahwa menurunnya dukungan masyarakat terhadap partai aceh juga disebabkan oleh permasalahan internal dari partai acehnya salah satunya ialah mereka kesulitan untuk mencari kader yang sesuai dengan kebutuhan partai, dan ada beberapa program yang tidak sampai kepada masyarakat. Jika dilihat dari faktor eksternal beliau mengatakan bahwa partai aceh saat ini tidak lagi menjadi partai yang banya diminati dikarenakan partai aceh dianggap tidak membawa perubahan khususnya bagi masyarakat aceh.

Hal yang hampir serupa juga dikatakan oleh pengamat politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Politik yaitu bapak Iqbal Ahmady S.IP., M.IP. beliau mengatakan bahwa penyebab dari lemahnya dukungan masyarakat terhadap Partai Aceh di kota Banda Aceh itu disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah karena manajemen partai yang kurang bagus sehingga menyebabkan kaderisasi anggota terhambat, tidak adanya belanja tokoh, dan calon legislatif yang diusung kurang kompeten. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa Partai Aceh belum menemukan pola/strategi, visi misi, dan program yang bagus untuk dikampanyekan kepada masyarakat kota Banda Aceh. Sedangkan untuk faktor eksternal, masyarakat di kota Banda Aceh kebanyakan atau sebagian besar adalah pemilih rasional, hal ini disebabkan karena wilayah Banda Aceh sudah berstatus kota dan sebagian besar penduduk kota Banda Aceh adalah masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga mereka tidak terlalu peduli pada hal-hal yang bersifat simbolik seperti kesamaan suku, bahasa, budaya karena hal tersebut tidak akan membuat mereka kenyang atau bisa makan. Tetapi, mereka lebih peduli terhadap visi misi dan program yang diperjuangkan oleh sebuah partai. Selain daripada itu, kota Banda Aceh juga tidak termasuk wilayah yang memiliki basis atau sejarah konflik kelam pada masa lalu saat GAM berseteru dengan TNI.

Dari hasil wawancara dengan Pak Iqbal dapat kami simpulkan bahwa Partai Aceh perlu meningkatkan tata kelola partainya dan menyesuaikan strategi politiknya agar lebih relevan dengan kondisi di Banda Aceh. Dengan demikian, Partai Aceh bisa memperoleh kembali kepercayaan dan dukungan dari pemilih di kota tersebut. Pak Iqbal juga mengatakan, masyarakat Aceh seharusnya tetap mengeksiskan Partai Aceh sebagai salah satu partai lokal di Aceh, apapun ceritanya. Beliau bersikukuh untuk tetap memilih partai lokal saat pemilu, tidak mesti Partai Aceh karena dengan memilih partai lokal, maka uang yang dimiliki oleh pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih masih berputaran uang di daerah Aceh dan hanya sedikit yang beredar diluar Aceh, sehingga roda perekonomian Aceh akan terus bergerak

walaupun yang terpilih di pemilu itu tidak lebih kompeten dari calon yang diusung oleh partai nasional.

Dengan demikian, terlihat bahwa keberadaan Partai Aceh (PA) di Banda Aceh menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Masalah basis pemilih yang tidak kuat, minimnya dampak konflik di kota ini, serta tingkat pendidikan yang tinggi menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi penurunan kursi PA di Banda Aceh.

Jika dikaji secara teori politik identitas, partai aceh menggunakan identitas lokal dalam politik yaitu, partai Aceh sering kali terkait erat dengan identitas etnis dan budaya Aceh, Partai aceh menggunakan masalah yang ada di aceh serta aspirasi untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Dalam pemilihan kader partai Aceh cenderung menggunakan simbol, lambang, dan bahasa yang secara khusus terkait dengan budaya dan sejarah Aceh untuk memperkuat identitas politik mereka. Partai Aceh sering kali menekankan isu-isu yang penting bagi Aceh, seperti penegakan syariat Islam, pemulihan pasca-konflik, otonomi khusus, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Partai Aceh umumnya merekrut kader dari kalangan lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, sejarah, dan kebutuhan masyarakat Aceh. Partai Aceh secara konsisten memperjuangkan otonomi yang lebih besar bagi Aceh, termasuk dalam hal pengaturan kebijakan ekonomi, hukum, dan sosial. Partai Aceh sering kali bekerja sama dengan pemimpin lokal yang memiliki pengaruh di Aceh untuk memperkuat basis dukungan dan menjalankan agenda politik Aceh. Politik identitas di Partai Aceh seringkali menjadi bagian integral dari pandangan politik dan strategi mereka, dengan fokus pada pemeliharaan identitas dan kepentingan masyarakat Aceh.

Namun jika berdasarkan hasil wawancara kami bersama dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala yaitu bapak Helmi, S.IP.,M.IP beliau mengatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah kursi di DPR Aceh dan DPRK di beberapa kabupaten/kota, situasi di Banda Aceh menunjukkan tren yang berbeda. Partai Aceh tidak memiliki basis yang kuat di Banda Aceh, di mana masyarakat kota cenderung memilih partai nasional. Ini tidak menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap Partai Aceh, tetapi lebih pada ketiadaan basis yang kuat dan kurangnya daya tarik yang unik bagi penduduk kota.

Beliau juga mengatakan bahwa di Aceh, pentingnya eksistensi partai lokal yang kuat dalam demokrasi politik. Persaingan antara partai lokal harus sebanding dengan persaingan antara partai nasional, bahkan partai lokal harus unggul. Namun, kekhawatiran timbul karena saat ini dominasi partai lokal seperti PA belum mampu mengatasi tantangan pembangunan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, partai lokal harus melakukan pembaruan, mengajak partisipasi kaum muda, dan menawarkan visi misi yang inklusif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkaya demokrasi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurunnya dukungan masyarakat terhadap partai aceh merupakan permasalahan yang harus dipecahkan oleh pihak partai acehnya sendiri, sehingga dengan adanya manajemen partai yang lebih baik akan menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat diluar daerah basis untuk memilih partai aceh sebagai perwakilan mereka dalam menyampaikan aspirasi.

Namun berbeda dengan hasil wawancara kami bersama bapak Mukrijal, M.IP sebagai pihak akademisi yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala beliau mengatakan bahwa menurunnya dukungan masyarakat terhadap partai aceh yang dibuktikan dengan jumlah kursi yang diperoleh, bahwa dalam konteks politik di Banda Aceh, penting bagi partai politik untuk memiliki kader yang memiliki nilai tawar yang kuat terhadap masyarakat, seperti visi yang baik dan pendekatan yang sosiologis. Pemilih di sana cenderung rasional dan memperhatikan visi-misi calon sebagai acuan dalam memilih. Partai

juga harus mempertimbangkan persaingan yang ketat antara partai lokal dan nasional serta faktor-faktor lain seperti identifikasi partai dan kampanye dalam mempengaruhi pemilih.

Berbeda dengan pendapat yang kami dapatkan dari Bapak Dr.Effendi Hasan, M.A. sebagai pengamat politik bahwa dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2024, Partai Aceh memperoleh peningkatan kursi di DPR Aceh, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut tidak menurun. Strategi yang efektif, seperti memilih tokoh-tokoh bekas bupati atau walikota, membantu dalam peningkatan elektabilitas. Namun, di Banda Aceh, keberhasilan Partai Aceh tidak terjadi, disebabkan oleh penempatan tokoh-tokoh yang kurang berpengaruh dan kinerja inkamben yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Kesimpulannya pada wawancara ini, kepercayaan masyarakat di Banda Aceh lebih tergantung pada strategi politik yang tepat dan kinerja para calon.

### **Kekecewaan dan Tantangan Masyarakat Aceh terhadap Partai Lokal**

Kekecewaan dan tantangan masyarakat Aceh terhadap partai lokal tergambar dalam dinamika politik serta perkembangan ekonomi dan sosial di provinsi tersebut. Meskipun partai lokal lahir sebagai hasil dari kompromi politik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat, respons masyarakat pada awalnya positif. Namun, seiring berjalannya waktu, kekecewaan mulai muncul karena kinerja yang kurang memuaskan dari partai lokal, seperti kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai.

*Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Aceh dimana sekarang saya merasa kepercayaan kepada Partai Aceh dan partai lokal lainnya telah menurun. Banyak kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bekas pejabat seperti Irwandi Yusuf, Ilyas Pasee, dan Suaidi Yahya tersandung kasus korupsi besar. Sebagai hasilnya, Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Meskipun Aceh telah menerima dana otonomi khusus yang besar dari pemerintah pusat selama bertahun-tahun, namun laju pembangunan tidak sesuai harapan. Korupsi dalam penggunaan dana otonomi khusus sering terjadi, seperti dalam program beasiswa dan pembangunan infrastruktur. Investasi minim dan kurangnya pertumbuhan industri juga menjadi masalah serius. Pada pemilu sebelumnya tahun 2019, Partai Aceh kehilangan banyak dukungan, hanya mendapatkan 18 dari 81 kursi di DPR Aceh. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pada pemilu 2024, antusiasme masyarakat Aceh terhadap Partai Aceh sudah tidak sebesar dulu. Ini juga berlaku bagi saya dan teman-teman seumuran saya.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Aceh merasa kecewa dengan janji-janji perubahan yang diusung oleh partai lokal, terutama terkait isu kemiskinan dan pembangunan. Meskipun Aceh telah mendapatkan dana otonomi khusus yang besar dari pemerintah pusat, namun laju pembangunan tidak sesuai harapan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite politik lokal juga menjadi salah satu faktor yang menambah kekecewaan masyarakat.

Selain itu, hasil pemilu terakhir menunjukkan penurunan dukungan terhadap partai lokal, seperti Partai Aceh, yang semakin kehilangan kursi di DPR Aceh. Hal ini mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja partai lokal dalam mewujudkan perubahan yang diharapkan. Dengan demikian, kekecewaan masyarakat Aceh terhadap partai lokal menjadi tantangan besar bagi partai-partai tersebut dalam pemilu 2024. Masyarakat Aceh menginginkan perubahan yang nyata dan kinerja politik yang lebih baik dari partai lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan provinsi tersebut.

## **Penguatan Dukungan Masyarakat Aceh terhadap Partai Lokal**

Dukungan masyarakat terhadap Partai Aceh pada pemilu 2024 di Kota Banda Aceh dapat diperkuat melalui beberapa solusi. Pertama, PA perlu meningkatkan keterlibatan dan komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Ini dapat dilakukan melalui kampanye yang lebih inklusif dan program-program yang nyata dan berdampak langsung bagi warga, seperti pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan, dan pendidikan politik.

Kedua, PA harus meningkatkan tata kelola partai, termasuk transparansi dalam pengelolaan dana dan keterbukaan dalam proses pemilihan calon. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan membuat mereka lebih cenderung untuk memberikan dukungan.

Selanjutnya, PA perlu memperkuat identitas politiknya dengan mengedepankan isu-isu yang relevan dan sensitif di Banda Aceh, seperti lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ini akan membantu partai untuk memperluas basis pemilihnya dan meningkatkan dukungan di tengah masyarakat yang semakin kritis.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, Partai Aceh dapat memperoleh dukungan yang lebih kuat dari masyarakat Banda Aceh pada pemilu 2024, memperbaiki citra partai, dan meningkatkan representasinya di DPR Aceh.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa partai politik lokal di Aceh, terutama Partai Aceh, menghadapi tantangan dalam mempertahankan dukungan masyarakat. Meskipun lahir sebagai bagian dari perjanjian perdamaian dan memiliki potensi awal yang kuat, beberapa faktor menyebabkan penurunan dukungan, seperti kinerja yang kurang memuaskan, kasus-kasus korupsi, dan kurangnya efektivitas dalam menjalankan fungsi partai.

Penting bagi partai politik lokal, termasuk Partai Aceh, untuk meningkatkan tata kelola internal, komunikasi dengan masyarakat, dan kejelasan visi misi serta program-program yang dijalankan. Selain itu, strategi politik yang lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat, serta penguatan identitas politik yang relevan dengan isu-isu lokal, diperlukan untuk memperoleh kembali kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Dalam konteks pemilihan di Kota Banda Aceh, terdapat tantangan khusus, seperti minimnya basis pemilih yang kuat, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kurangnya dampak konflik. Oleh karena itu, partai politik lokal perlu beradaptasi dengan kondisi lokal tersebut untuk memperoleh dukungan yang lebih kuat.

Meskipun demikian, penting untuk diakui bahwa keberadaan partai politik lokal memiliki nilai penting dalam demokrasi politik, karena mereka bisa menjadi suara yang lebih dekat dengan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan lokal secara lebih khusus. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap partai politik lokal perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

## **Saran**

Untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Aceh pada pemilu 2024 di Kota Banda Aceh, disarankan agar partai meningkatkan komunikasi dan keterlibatan langsung dengan masyarakat melalui kampanye yang inklusif dan program-program nyata yang berdampak langsung, memperbaiki tata kelola partai termasuk transparansi dalam pengelolaan dana dan proses pemilihan calon guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta fokus pada isu-isu yang relevan dan sensitif di Banda Aceh seperti lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat identitas politik

Partai Aceh. Selain itu, partai perlu melibatkan pemimpin lokal yang berpengaruh guna memperluas basis dukungan dan menjalankan agenda politik yang lebih efektif, serta melakukan pembaruan strategi politik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Banda Aceh yang cenderung rasional dan memperhatikan visi-misi calon dalam menentukan pilihan.

### Daftar Pustaka

- Ana, S. (2020). *Kaderisasi Dan Keterpilihan Caleg DPRK Partai Gerindra Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Arjanto, D. (2023, juni 13). Panduan Pemilu 2024 : Mengapa ada partai politik aceh. *tempo.com* .
- AW, M. J. (2009). Perkembangan dan Prospek Partai Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 99-128.
- Efendi, D., & Hasan, E. (2017). Strategi Kemenangan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4).
- Fahlevi, R. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Peluang Partai Lokal Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Januar, E. (2019). TANTANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science* .
- Liata, N. (2020). Relasi pertukaran sosial antara masyarakat dan partai politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* , 80.
- Marwazi, R., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi Dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 70-82.
- Mujib, I., Abdullah, I., & Nugroho, H. (2014). Kebangkitan Lokal di Aceh: Pembentukan Identitas Keacehan, Reaktualisasi Ruang Publik dan Penguatan Kearifan Lokal Pasca Konflik dan Tsunami. *Harmoni*, 13(2), 20-36.
- Nasrudin, J. (2018). POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* .
- Nur, M., Usman, U., & Safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(2), 140-149.
- Saputra, R., Muradi, M., & Agustino, L. (2020). Afiliasi Partai Aceh Ke Partai Nasional (Studi Kasus: Keikutsertaan Kader Partai Aceh Dalam Partai Nasional Pada Pemilu Legislatif DPR RI 2019). *Jurnal Public Policy*, 6(1), 25-30.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yokyakarta: Graha Ilmu.
- Shandy, A. (2023). PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA. *ANDREW LAW* .
- Suhelmi, M. (2022). *ANALISIS MARKETING POLITIK PARTAI LOKAL ACEH (Studi Kekalahan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif DPRK Simeulue Tahun 2019)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)
- Usman. (2021). Analisis Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh Pasca Perdamaian. *Serambi Akademica*